



Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Perjuangan Tasikmalaya

| 2025

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Edisi IV



lp2m@unper.ac.id



Official LP2M Unper Tasikmalaya



lp2m.unper.ac.id



siska.unper.ac.id



YAYASAN UNIVERSITAS SILIWANGI
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

Jalan Pembela Tanah Air (PETA) No. 177 Kota Tasikmalaya, Kode Pos 46115
Telepon (0265) 326058, laman: <http://www.unper.ac.id>



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA
NOMOR 64/041063/KPT/2025

tentang

PENETAPAN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

REKTOR UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. Bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah wajib universitas dalam menempuh program Strata 1 (S1) di Universitas Perjuangan Tasikmalaya;
b. Bahwa untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) maka diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan acuan bagi LP2M, mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan;
c. Bahwa untuk kepentingan butir (a) dan (b) diatas, maka perlu Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 603/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Perjuangan Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.
6. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Universitas Siliwangi nomor SKEP.046/YUS/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Perjuangan Tasikmalaya.
7. Surat Keputusan Yayasan Universitas Siliwangi Nomor : SKEP.029/P/YUS/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Perjuangan Tasikmalaya Periode 2024 - 2028.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) periode 2015-2035.
- Memperhatikan** : Surat Ketua LP2M UNPER nomor 78/P/LP2M-UP/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan.....(2)

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA.
- Kesatu : Menetapkan pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagaimana tercantum dalam butir kesatu, menjadi bahan acuan bagi penyelenggaraan KKN yang dilaksanakan oleh LP2M beserta tim panitia KKN di Universitas Perjuangan Tasikmalaya;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Keempat : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor nomor 147/041063/KPT/2023 tanggal 18 Juni 2025 dinyatakan tidak berlaku.
- Petikan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Juni 2025

Rektor
Universitas Perjuangan Tasikmalaya,



Dr. H. D. Yadi Heryadi, Ir., M.Sc.
NIP 196304262021211001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Perjuangan dapat tersusun dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

KKN merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan nyata di masyarakat.

Pedoman KKN ini disusun sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Perjuangan, khususnya mahasiswa pelaksana KKN, dosen pembimbing lapangan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pedoman ini berisi informasi lengkap mengenai tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan, sistem penilaian, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN.

Melalui program KKN ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kepekaan sosial, kemampuan kerja sama, kepemimpinan, dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam bentuk transfer pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas hidup mereka.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pedoman ini di masa mendatang. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan program KKN Universitas Perjuangan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita.

Tasikmalaya, Mei 2025

Ketua LPPM

Dr. Putri Dian Wulansari, M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.3. Prinsip Pelaksanaan KKN	3
1.4. Tujuan KKN	3
1.5. Sasaran KKN	4
BAB II PENGELOLAAN KKN	7
BAB III RUANG LINGKUP KKN.....	10
3.1. KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).....	10
3.2. KKN Tematik Reguler	14
3.3. KKNT-MBKM.....	15
BAB IV PROGRAM KERJA KKN.....	20
4.1. KKN-PPM.....	20
4.2. KKN Tematik Reguler	21
4.3. KKN Tematik MBKM	22
BAB V TAHAPAN KEGIATAN KKN DAN PENILAIAN.....	26
5.1. Tahap Kegiatan KKN.....	26
5.2. Penilaian Mahasiswa Peserta KKN.....	27
5.3. Sertifikat KKN.....	28
BAB VI TATA TERTIB PESERTA KKN	29
6.1. Manfaat Tata Tertib	29
6.2. Tata Tertib dalam Pelaksanaan KKN.....	29
6.3. Larangan, Jenis Larangan, dan Sanksi	30
BAB VII EXPO KKN	32
BAB VIII PENJAMINAN MUTU.....	34
BAB IX PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN merupakan mata kuliah wajib di Universitas Perjuangan Tasikmalaya (UNPER) yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa program strata satu (S1) sebagai bentuk pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui mata kuliah KKN, mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mengabdikan dirinya dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat kuliah dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan.

Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman nyata di masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan generatif berupa *life skills* (kecakapan hidup) seperti kemampuan berpikir dan bernalar secara analitik, berdasarkan sumber empirik dan realistik, agar dapat merancang dan melaksanakan program, membantu mengatasi permasalahan yang ada, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu mengatur diri sendiri dan melatih keterampilan diri dalam bekerja. Dengan demikian, mahasiswa akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai nilai tambah selama menempuh kuliah di Universitas Perjuangan Tasikmalaya.

Pada mata kuliah KKN terdapat dua proses pelaksanaan tridharma yakni pembelajaran pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dharma pendidikan dan mahasiswa mengabdikan dirinya kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dharma pengabdian mahasiswa. Selain itu, program dan kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dapat didasarkan atas hasil pengembangan pendidikan maupun penelitian. Dalam pelaksanaannya, kajian secara cermat perlu dilakukan sebelum menentukan berbagai program yang akan dilaksanakan di masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hasil observasi nyata di lapangan, kajian analitis kritis, dan harus ada kejelasan tugas dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai sebuah program PkM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok.

Oleh karena itu, bentuk pembelajaran mata kuliah KKN dilaksanakan dengan melakukan interelasi langsung antara mahasiswa dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan.

Diharapkan melalui interelasi tersebut mahasiswa mampu: 1) menjadi bagian dari masyarakat yang secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat, dan 2) memberikan pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif. Sehingga, kehadiran mahasiswa peserta KKN dari UNPER diharapkan dapat menjadi penggerak dalam memandirikan, memampukan, dan membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan,

1.2. Prinsip Dasar KKN UNPER

KKN UNPER dikembangkan berdasarkan empat prinsip dasar sebagai berikut.

1. Prinsip Keterpaduan Aspek Tridharma Perguruan Tinggi

Keterpaduan antara seluruh dharma dari Tridharma Perguruan tinggi yakni aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis kearifan lokal harus dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan program KKN UNPER mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KKN.

2. Prinsip Empati-Partisipatif

Program KKN dikembangkan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa, dosen, dan masyarakat itu sendiri dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara komprehensif, realistis, dan tepat. Lebih dari itu, KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan atau penyelesaian suatu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan.

3. Prinsip Multidisipliner

UNPER menyadari bahwa permasalahan yang ada di masyarakat sangat kompleks. Pemecahan masalahnya memerlukan berbagai disiplin ilmu secara bersama-sama. Oleh karena itu, KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dalam operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja multidisipliner yakni penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat lokasi KKN.

4. Prinsip Berbasis Kearifan Lokal

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang di implementasikan dalam keseluruhan bidang pemberdayaan yang akan dilaksanakan (bidang pendidikan, kesehatan, daya beli/ekonomi, lingkungan dan kelembagaan).

1.3. Prinsip Pelaksanaan KKN

KKN UNPER dalam pelaksanaannya dikembangkan berdasarkan empat prinsip pelaksanaan sebagai berikut.

1. Prinsip Gagasan Bersama

Tema-tema dalam KKN UNPER merupakan gagasan bersama antara UNPER, pemerintah daerah, mitra kerja, dan mahasiswa.

2. Prinsip Dana Bersama

Pendanaan KKN didukung bersama antara mahasiswa, universitas, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.

3. Prinsip Keluwesan

Tema-tema dan pelaksanaan KKN disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

4. Prinsip Berkesinambungan

Tema-tema dalam program KKN pada suatu lokasi diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan target tertentu yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan.

1.4. Tujuan KKN

Tujuan dari pelaksanaan KKN, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah adalah:

1. Mahasiswa peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mampu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan peran sebagai pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.
2. Mahasiswa mampu bekerjasama secara multidisipliner dalam berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Mahasiswa menguasai berbagai cara berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktivitas pembangunan pada umumnya serta pengembangan masyarakat belajar (*learning society*) pada khususnya.
4. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat berdasarkan analisis ilmiah dan penerapan IPTEKS, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.

5. Mengembangkan jiwa tanggung jawab mahasiswa dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya koperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi kesejahteraan bangsa.

Sesuai dengan pandangan Kurikulum Berbasis KKN, tujuan KKN adalah memberikan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret kompetensi minimal yang perlu diperoleh oleh mahasiswa peserta KKN adalah sebagai berikut:

- a) Mampu mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat,
- b) Mampu menganalisis data dan informasi,
- c) Mampu mengidentifikasi masalah,
- d) Mampu mengidentifikasi potensi,
- e) Mampu merancang program pemberdayaan,
- f) Mampu melakukan kerjasama (*networking*),
- g) Mampu menggalang dan mensinergikan potensi,
- h) Mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah,
- i) Mampu bekerja secara multidisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat,
- j) Mampu mengembangkan motivasi diri dan kelompok,
- k) Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat,
- l) Mampu menggali kearifan lokal,
- m) Menunjukkan rasa tanggung jawab,
- n) Menunjukkan rasa kesetiakawanan,
- o) Menunjukkan sikap disiplin dan efisiensi waktu,
- p) Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan,
- q) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan,
- r) Mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok,
- s) Mampu menyimpulkan hasil kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan KKN serta menemukan isu-isu strategis untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal.

1.5. Sasaran KKN

Pada dasarnya kegiatan KKN UNPER diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu :

a. Mahasiswa

Melalui KKN, diharapkan mahasiswa dapat belajar untuk mengembangkan dirinya serta sekaligus belajar untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa

diharapkan:

- 1) mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat,
- 2) mampu merancang program pemberdayaan,
- 3) mampu berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral,
- 4) mampu mengelola jejaring kerjasama multidisipliner,
- 5) mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi masyarakat dan kearifan lokal serta program pengembangan dan pembangunan,
- 6) mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program berbasis akuntabilitas,
- 7) mampu memahami kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan masyarakat sehingga dapat menjadi *inovator*, *motivator*, dan *problem solver*, serta
- 8) memiliki sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat.

Tingkat keberhasilan program kegiatan dari segi sasaran mahasiswa adalah diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

b. Masyarakat

Melalui kegiatan KKN diharapkan masyarakat :

1. Memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, yang ditandai dengan meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur (seperti kenaikan *income per capita*, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan umur harapan hidup).
2. Memiliki motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Menjadi kader-kader pemberdayaan masyarakat.

c. Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Melalui kegiatan KKN diharapkan Universitas Perjuangan Tasikmalaya:

1. Mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan masyarakat sebagai hasil interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat, sehingga UNPER akan lebih terarah dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya baik melalui pengembangan kurikulum program studi maupun program penelitian yang sesuai dengan dinamika masyarakat.
2. Dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam

pengembangan IPTEKS.

3. Dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat.

BAB II PENGELOLAAN KKN

Pengelola program KKN melibatkan unit kerja dari tingkat pengambil kebijakan sampai dengan tingkat implementasi di lapangan. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan pengelolaan KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang di dalamnya terdiri atas Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, dan Kepala Pusat KKN dan Mitigasi Bencana, sedangkan pada tingkat implementasi di lapangan adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Pembimbing Lapangan Desa (PLD), Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Kormacam), Koordinator Mahasiswa Desa (Kormades), dan Mahasiswa Peserta KKN. Tugas pokok masing-masing pengelola tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketua LP2M UNPER. Ketua LP2M bertugas :

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN.
- 2) Menyusun kriteria dan cara penilaian program KKN.
- 3) Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan program KKN.
- 5) Memberi laporan kinerja program KKN kepada Rektor.

b. Sekretaris LP2M

Sekretaris LP2M dalam kegiatan KKN bertugas membantu ketua LP2M dalam:

- 1) Menjalankan kesekretariatan dan pengadministrasian program KKN.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program pada bagian pengelolaan KKN.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan KKN.
- 4) Melakukan pengelolaan dan pendataan output dan outcome hasil KKN.
- 5) Menyusun laporan kinerja pengelolaan KKN.

c. Kepala Pusat KKN dan Mitigasi Bencana

Kepala Pusat KKN dan Mitigasi Bencana dalam kegiatan KKN bertugas membantu ketua LP2M dalam hal:

- 1) Merumuskan model-model KKN yang sesuai untuk mahasiswa dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Merumuskan model sinergi antara Pemerintah Daerah lokasi KKN, masyarakat, dan Mahasiswa KKN dalam memberdayakan dan meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat sebagai sumber daya strategis secara sinergis, simultan dan sustainable berkenaan dengan ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup dan kearifan budaya lokal.

- 3) Menganalisis efektifitas pelaksanaan KKN.
- 4) Menganalisis kelayakan lokasi dan masyarakat sasaran KKN
- 5) Mengembangkan SDM pendukung KKN

d. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN.
- 2) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.
- 3) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan bersama mahasiswa di lokasi KKN
- 4) Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN.
- 5) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN
- 6) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa agar program KKN dapat terlaksana dengan baik.
- 7) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN dan antara mahasiswa KKN dengan masyarakat, perangkat pemerintah dan instansi terkait.
- 8) Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi.
- 9) Menyusun laporan tertulis mengenai hasil kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan khusus.

e. Pembimbing Lapangan Desa (PLD)

PLD dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.
- 2) Mengadakan orientasi pendahuluan bersama mahasiswa di lokasi KKN.
- 3) Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN.
- 4) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN.
- 5) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa agar program KKN dapat terlaksana dengan baik.
- 6) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antara mahasiswa KKN dengan masyarakat, perangkat pemerintah dan instansi terkait di lokasi KKN.

- 7) Melakukan koordinasi dengan DPL dan Kepala Desa.
- 8) Menyampaikan laporan mengenai hasil kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan khusus.

f. Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Kormacam)

Kormacam dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Sebagai koordinator kelompok KKN di tingkat kecamatan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Peserta KKN antar desa di tingkat kecamatan dan antara Mahasiswa Peserta KKN dengan Perangkat Kecamatan.
- 3) Menerima laporan dari Kormades dan memberikan laporan dari Kormades tersebut kepada LP2M dan perangkat kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi.
- 4) Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan KKN di tingkat kecamatan.

g. Koordinator Mahasiswa Desa (Kormades)

Kormades dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Sebagai koordinator kelompok KKN di tingkat desa untuk mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Mahasiswa KKN di tingkat desa.
- 2) Memberikan laporan kepada DPL, perangkat desa dan perangkat kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi.
- 3) Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan KKN di tingkat Desa.

h. Mahasiswa Peserta KKN

Seluruh mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil kegiatan KKN serta mematuhi paradigma pemberdayaan, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan KKN, serta tata tertib KKN.

Disamping itu, kegiatan KKN harus diselenggarakan dengan melibatkan mitra kerja (masyarakat, pemerintah, industri, lembaga usaha, dan lembaga lainnya). Dukungan kemitraan dalam pelaksanaan KKN dapat berupa dana, jasa, sarana dan prasarana yang sah dan tidak mengikat. Kerjasama kemitraan dalam kegiatan KKN diwujudkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di UNPER. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN dapat bersumber dari mahasiswa peserta KKN, Universitas, Pemerintah, swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah, dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP KKN

KKN di Universitas Perjuangan Tasikmalaya memiliki tiga jenis KKN yaitu KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), KKN Tematik Reguler, dan KKNT-MBKM.

3.1. KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

Sesuai dengan visi dan misi UNPER, kebijakan KKN UNPER adalah ikut serta membangun masyarakat. Membangun masyarakat yang dimaksud adalah turut serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Oleh karena itu, KKN-PPM UNPER diarahkan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan masyarakat.

Terdapat banyak indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan masyarakat, salah satu di antaranya adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia di atas 15 tahun. Sedangkan standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 323 ribu rupiah (2,90 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka program kerja KKN-PPM UNPER diarahkan untuk

melaksanakan pembelajaran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, program kerja yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN-PPM UNPER adalah bidang-bidang yang mendukung peningkatan IPM. Bidang-bidang dimaksud terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli/ekonomi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk ditambah dengan bidang-bidang yang mendukung terhadap keempat bidang utama tersebut seperti pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, kelembagaan, dan lain-lain. Seluruh bidang pendukung IPM tersebut dapat dipecah ke dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan harus berprinsip pada pemberdayaan masyarakat bukan bersifat *charity* atau bagi-bagi hadiah.

Dalam melaksanakan kegiatan dari seluruh bidang pendukung IPM perlu dilakukan pemberdayaan non fisik dan pemberdayaan fisik. Pemberdayaan non fisik yang dimaksud adalah proses mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN. Pembangunan non fisik analog dengan sosialisasi. Sedangkan pembangunan fisik adalah pelaksanaan fisik dari kegiatan yang diprogramkan. Pemberdayaan fisik bukan selalu berarti membangun bangunan. Sebagai contoh adalah mahasiswa KKN memprogramkan kegiatan pendirian PAUD. Maka agar kegiatan pendirian PAUD tersebut dapat berhasil guna, maka mahasiswa KKN perlu melakukan pemberdayaan non fisik terlebih dahulu yang berupa penyuluhan tentang “Pentingnya Pendidikan Anak Balita”. Melalui penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat akan tergugah pikiran dan hatinya untuk mendirikan PAUD. Sedangkan pemberdayaan fisiknya adalah pelaksanaan pendirian PAUD mulai dari persiapan, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAUD, pembentukan struktur organisasi PAUD, perijinan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan PAUD, dan seterusnya. Atas dasar hal tersebut maka ruang lingkup KKN-PPM UNPER diarahkan pada pengembangan indikator IPM yang meliputi 5 (lima) bidang pemberdayaan sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan Bidang Pendidikan
- 2) Peningkatan Bidang Kesehatan
- 3) Pengembangan Bidang Ekonomi
- 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Mitigasi Bencana
- 6) Pengelolaan Kelembagaan

Berdasarkan ruang lingkup KKN-PPM tersebut, maka program kerja mahasiswa peserta KKN-PPM harus meliputi keenam bidang pemberdayaan tersebut yakni pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan

kelembagaan. Keenam bidang pemberdayaan masyarakat tersebut dalam penyusunan program kerjanya perlu dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh penjabaran bidang-bidang pemberdayaan masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan KKN adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan
 - a) Pembentukan Taman Bacaan
 - b) Pembentukan Kejar Paket A/B/C
 - c) Pembentukan Sanggar Belajar Remaja
 - d) dll.
2. Bidang Kesehatan
 - a) Pembentukan Posyandu
 - b) Pembangunan Apotek Hidup
 - c) Senam Lansia
 - d) dll.
3. Bidang Ekonomi
 - a) Pembuatan Abon Ikan
 - b) Pembuatan Kripik Singkong
 - c) Budidaya Bebek
 - d) dll.
4. Bidang Lingkungan Hidup
 - a) Gerakan Jumsih
 - b) Pembuatan Biopori
 - c) Pembuatan Sumur Resapan
 - d) Penghijauan
 - e) dll.
5. Mitigasi Bencana
 - a) Kualitas dan Akses Layanan Dasar
 - b) Dasar Sistem Penanggulangan Bencana
 - c) Pengelolaan Resiko Bencana
 - d) Kesiapsiagaan Darurat
 - e) Kesiapsiagaan Pemulihan
 - f) dll.
6. Bidang Kelembagaan
 - a) Pembuatan Profil Desa

- b) Pembuatan Sistem Informasi Desa
- c) dll.

Dengan bobot SKS KKN-PPM yang berjumlah 3 SKS Program kerja yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 35 hari kerja harus mencakup 6 bidang tersebut.

KKN PPM adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah tertentu. Dengan demikian KKN PPM dapat dikatakan sebagai KKN berbasis *problem solving* untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu dan untuk mencapai target tertentu sesuai dengan permasalahannya. Sifat KKN PPM ini ialah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan, dan berbasis kemasyarakatan.

KKN PPM yang dilaksanakan di UNPER berprinsip pada keterpaduan, kebutuhan, serta kemampuan sendiri. KKN PPM dilaksanakan secara terpadu mencakup aspek intelektual, sosial-ekonomi, fisik dan manajerial agar mampu meningkatkan aspek pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Menagacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, KKN PPM di UNPER memadukan unsur pendidikan, pengajaran, serta pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian. Program KKN PPM ini juga memadukan gagasan bersama antara Perguruan Tinggi, pemerintah, dan mitra yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prinsip kebutuhan pada KKN PPM ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata dan terasa oleh perseorangan, lembaga masyarakat dan pemerintah. Artinya kegiatan ini bertumpu pada kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat tersebut disusun oleh masyarakat, bersama masyarakat, dalam masyarakat dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan bersama. Sedangkan prinsip kemampuan sendiri ialah KKN PPM ini dilaksanakan dengan mengutamakan penggalian dan pengembangan potensi lokal serta peningkatan swadaya masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

Disamping itu sasaran KKN PPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya ialah meningkatnya percepatan pembangunan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan infrastruktur wilayah, kemandirian energi dan kecukupan air baku, penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup, pembangunan pedesaan, pengembangan budaya lokal, wisata dan destinasi wisata. Selain itu sasaran lainnya ialah memberikan pengalaman & keterampilan kepada mahasiswa tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner

dalam memecahkan masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan masyarakat

3.2. KKN Tematik Reguler

KKN Tematik Reguler yang telah dilaksanakan di UNPER diantaranya ialah KKN Tematik Reguler dengan judul “Pemanfaatan Predator Alami Burung Hantu (*Tyto alba*) Sebagai Upaya Pengendalian Hama Tikus Sawah (*Rattus argentiventer*), KKN ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani dengan memanfaatkan predator alami burung hantu untuk menekan populasi hama tikus. KKN Tematik Reguler yang kedua ialah “Model Pengembangan Peternakan Ayam Buras *Backyard Farming*” yang mengembangkan ternak Ayam Buras menggunakan model *Backyard Farming* dalam rangka intensifikasi ayam buras dengan pendekatan tatalaksana pemberian pakan dan pelatihan penyusunan ransum untuk ayam buras sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan status produksi serta pembuatan demonstrasi plot berupa kandang *Backyard Chicken Flock*. Kedua Program KKN tersebut didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018.

KKN Tematik Reguler yang terakhir dilaksanakan oleh UNPER adalah KKN Tematik Covid-19. KKN Tematik tersebut telah dilaksanakan tahun 2020 dan 2022. Pada tahun tersebut berkenaan dengan meledaknya wabah Pandemi Covid-19. Model KKN Tematik Covid-19 bertujuan untuk membantu masyarakat dan Gugus Covid-19 dalam mencegah dan menanggulangi wabah pandemic Covid-19. Pelaksanaanya dilakukan oleh mahasiswa di lokasi/desa tempat tinggal mahasiswa. Mahasiswa wajib memberdayakan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penularan penyakit Covid-19, bahkan mahasiswa turut serta menanggulangi dampak yang terjadi akibat adanya wabah pandemic covid-19 baik dalam bidang kesehatan, Pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Pada dasarnya prinsip-prinsip pelaksanaan KKN Tematik Reguler UNPER ialah interdisipliner. Kelompok mahasiswa berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan UNPER. Mahasiswa melaksanakan tugasnya atas dasar mekanisme pola pikir & pola kerja secara interdisipliner, yakni permasalahan yang ada di masyarakat lokasi KKN dipecahkan dengan cara dikeroyok menggunakan berbagai disiplin keilmuan yang menyatu. Prinsip kedua ialah partisipasi aktif. Dalam KKN Tematik Regular, masyarakat, pemerintah beserta unsur-unsur lainnya yang berkaitan dengan program ini, didorong berpartisipasi aktif sejak perencanaan, pelaksanaan

hingga evaluasi program. Prinsip yang ketiga ialah prinsip keberlanjutan. KKN Tematik Reguler dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dimana program kegiatan yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya hingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah.

3.3. KKNT-MBKM

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu bentuk pembelajaran dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dapat dilakukan oleh Mahasiswa. Universitas Perjuangan Tasikmalaya, dalam upaya mendukung dan melaksanakan Permendikbud tersebut, melalui LPPM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN dengan menggunakan model KKN Reguler yang diperpanjang menjadi KKN Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut KKNT-MBKM. Dalam Kegiatan KKNT-MBKM ini mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan KKN Reguler menjadi selama minimal 1 (satu) semester dengan bobot SKS setara dengan minimal 20 SKS.

KKNT-MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Program KKNT-MBKM menjadi salah satu aktivitas yang dapat mengoptimalkan kemampuan *hard-skill* dan *soft-skill* mereka. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka KKNT-MBKM memiliki bobot minimal 20 SKS. Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Nomor 2 (IKU 2) terkait dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus minimal 20 SKS, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menawarkan program KKN Tematik MBKM bagi seluruh mahasiswa UNPER baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan LLDIKTI Wilayah IV.

KKNT-MBKM merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT-MBKM diharapkan dapat mengasah *soft skill*, kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan KKNT-MBKM dilakukan untuk mendukung Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Oleh karena itu Program Studi atau Calon DPL, bahkan

Mahasiswa Calon Peserta KKNT-MBKM dapat mengusulkan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT. Lokasi pelaksanaan KKNT-MBKM dapat dilakukan di desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang. Di desa tertinggal tersebut sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan yang baik untuk menggunakan dana desa. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa KKN yang dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat memberdayakan masyarakat desa. Tujuan KKNT-MBKM antara lain: 1) Kehadiran mahasiswa selama satu semester di desa dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya untuk bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah perdesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Sedangkan manfaat KKNT-MBKM bagi Mahasiswa adalah 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri. 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDes), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa. 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

Mahasiswa yang akan mengajukan KKNT-MBKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah lulus mata kuliah dengan memiliki minimal 100 sks.
2. Telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 5 semester.
3. Sanggup memperpanjang kegiatan KKN Reguler (3 sks) menjadi satu semester (20 sks).
4. Memiliki IPK minimal 2,75 sampai dengan semester 5.
5. Mendaftarkan diri mengikuti kegiatan KKNT-MBKM pada program studi / fakultas dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
6. Membuat dan mengajukan proposal kegiatan kepada LPPM (dapat dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah $\pm$ 10 orang per Desa dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda)).

7. Membuat Surat Pernyataan bahwa peserta bersedia berkegiatan KKN di lokasi yang telah ditentukan.
8. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.

Mahasiswa yang akan mengajukan KKNT-MBKM diwajibkan untuk membuat proposal perpanjangan dari KKN Regular (KKN-PPM atau KKNT Regular) ke KKNT-MBKM. Waktu pengajuan proposal KKNT-MBKM adalah pada minggu terakhir masa KKN Regular. Proposal diajukan kepada Ketua LP2M dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya Ketua LP2M mengundang Ketua Program Studi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kelayakan dan kesetaraan SKS program kerja yang diusulkan dengan Mata Kuliah yang relevan pada kurikulum Program Studi asal Mahasiswa guna memudahkan dalam penyetaraan/konversi dan pengakuan SKS dan nilai akhir setelah masa KKNT-MBKM berakhir.

KKNT-MBKM dapat pula direncanakan secara langsung oleh LPPM sebagai KKNT-MBKM. Jika direncanakan secara langsung maka LPPM bertugas untuk menyusun perencanaan kompetensi hasil KKN Mahasiswa mulai penyusunan *learning outcome* dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester KKNT-MBKM, perencanaan mata kuliah calon konversi, pencarian lokasi KKN yang memungkinkan tercapainya *learning outcome* KKNT-MBKM, dan lain-lain. Proposal KKNT-MBKM berisi program kerja yang akan dilakukan di Desa Lokasi KKN-MBKM. Program dan kegiatan yang diusulkan dapat memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK-ORMAWA) yakni program perpaduan dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dan Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) dari Direktorat Belmawa Dirjen Dikti atau dapat berbentuk blended dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yakni 1) Model KKNT Regular yang diperpanjang, 2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dan 3) Model KKNT Mengajar di Desa. Program dan Kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa kelanjutan dari KKN Regular yakni memperpanjang waktu pelaksanaan program dan kegiatan KKN Regular yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

Sebagai contoh Model KKNT-MBKM misalnya adalah model KKNT-MBKM Mengajar di Desa. Bagi Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di desa baik sekolah formal maupun non formal, sedangkan bagi Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Non Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar di sekolah non formal sesuai dengan bidang keahlian Mahasiswa dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna di sekolah-sekolah nonformal. KKNT-MBKM Mengajar di unit-unit Pendidikan di desa dapat bersifat membantu

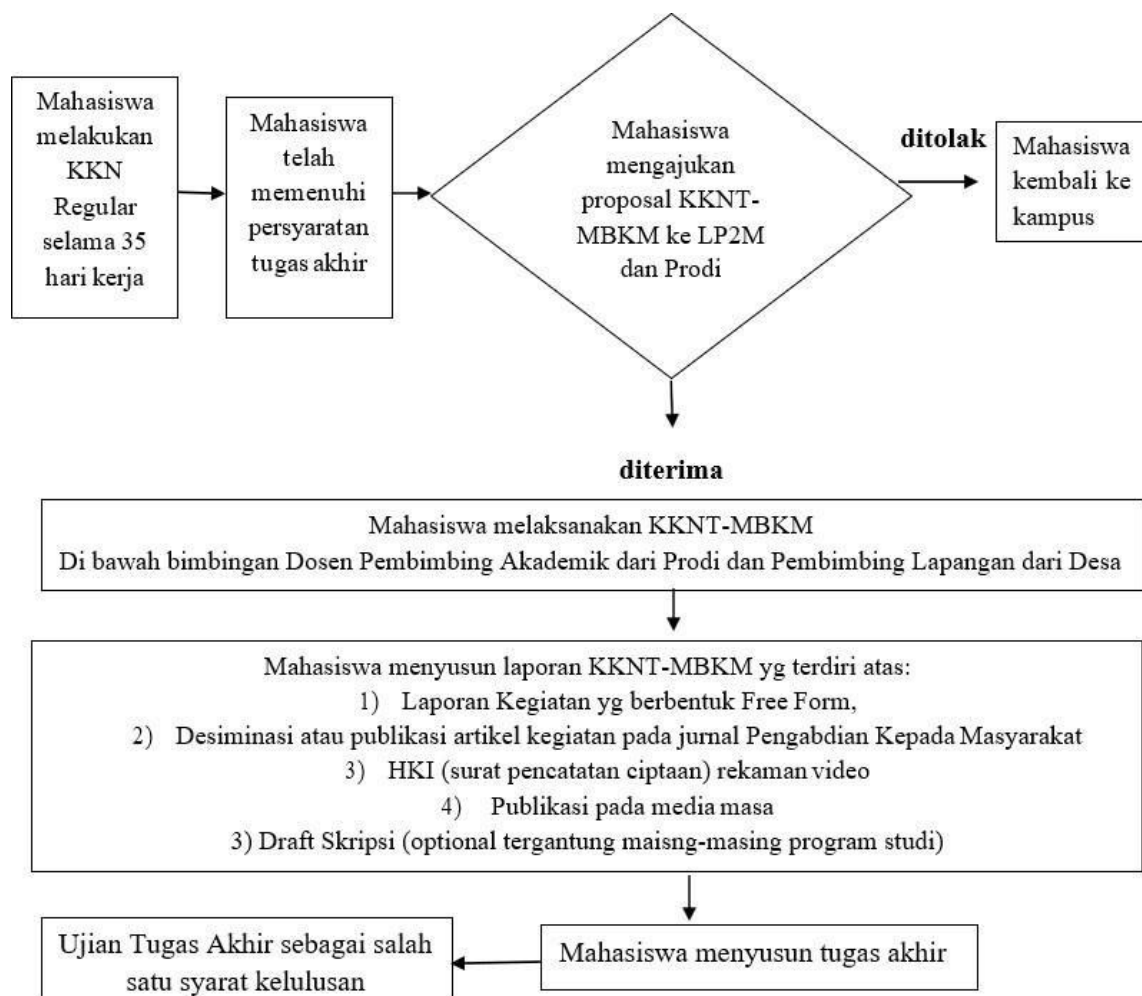
pengajaran formal dan non formal di desa. Sedangkan KKNT-MBKM dengan model Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, mahasiswa dapat mengusulkan program dan kegiatan berdasarkan peluang, kondisi, dan potensi desa guna membantu Desa dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Oleh karena itu, Universitas/Fakultas harus melakukan Kerjasama terlebih dahulu dengan Desa Mitra untuk membentuk Desa Binaan. Beberapa program dan kegiatan dari KKNT-MBKM dapat dijadikan sebagai topik Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa. Untuk melaksanakan Tugas Akhir dari hasil KKNT-MBKM maka mahasiswa harus menyusun proposal. Untuk menyusun proposal tersebut mahasiswa dapat berkonsultasi dengan calon Dosen Pembimbing Skripsi yang bidang ilmunya relevan dengan topik tugas akhir tersebut. Ketua Program Studi harus menyediakan Dosen pembimbing Tugas Akhir dan memfasilitasi mahasiswa untuk mempresentasikan proposalnya. Mahasiswa dalam melaksanakan KKNT-MBKM dapat membentuk kelompok dengan jumlah anggota antara ± 10 orang per Desa. Setiap Kelompok Mahasiswa KKNT-MBKM akan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan. Dosen Pembimbing Lapangan KKNT-MBKM terdiri atas 2 (dua) orang yakni Pembimbing Lapangan bidang Akademik dari Universitas yang selanjutnya disebut PLA dan Pembimbing Lapangan dari Desa yang selanjutnya disebut PLD. Bidang keahlian PLA disesuaikan dengan bidang keilmuan program kerja yang diusulkan oleh Mahasiswa, sedangkan PLD dipilih dari Tokoh Masyarakat Desa atau Perangkat Desa lokasi KKN yang membidangi program kegiatan di desanya.

Setiap Mahasiswa Anggota KKNT-MBKM selama melaksanakan program dan kegiatan diwajibkan untuk menyusun laporan harian (*logbook*). Laporan harian dilaporkan kepada PLA dan PLD. Jika KKNT-MBKM telah selesai dan seluruh program dan kegiatan telah tuntas dilaksanakan dengan baik, maka Mahasiswa diwajibkan Menyusun Laporan Akhir Hasil KKN-MBKM. Laporan akhir tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok Mahasiswa KKNT-MBKM disetujui oleh PLD, Kepala Desa/Lurah, PLA, dan Ketua LP2M.

Berdasarkan Laporan Akhir Hasil KKNT-MBKM, Ketua LP2M mengundang PLA dan Ketua Program Studi asal Mahasiswa untuk melakukan penyetaraan bobot SKS, kompetensi/mata kuliah, dan nilai akhir. Apabila hasil KKNT-MBKM yang dilakukan oleh Mahasiswa disetarakan dengan dharma Pendidikan atau mata kuliah, maka nilai akhir setiap mata kuliah hasil penyetaraan dikeluarkan dan disahkan oleh Ketua Program Studi asal Mahasiswa, sedangkan apabila disetarakan dengan dharma pengabdian kepada masyarakat maka nilai akhir

dikeluarkan dan disyahkan oleh Ketua LP2M dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Program Studi asal Mahasiswa. Apabila hasil KKNT-MBKM dijadikan sebagai Tugas Akhir Mahasiswa, maka untuk penyelesaian Tugas Akhir selanjutnya seperti seminar hasil tugas akhir dan ujian tugas akhir diserahkan kepada Ketua Program Studi atau dapat diserahkan langsung kepada Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Alur pelaksanaan model KKNT Reguler yang diperpanjang menjadi KKNT-MBKM ialah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur KKNT Reguler yang diperpanjang menjadi KKNT-MBKM

BAB IV PROGRAM KERJA KKN

Seluruh peserta KKN wajib menyusun program kerja yang akan dilakukan selama pelaksanaan KKN. Sebelum dilakukan pelepasan KKN, mahasiswa harus menyusun program kerja tentatif dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan berkoordinasi dengan pejabat desa setempat. Program kerja tentatif merupakan pedoman bagi mahasiswa dalam penjangkaran aspirasi masyarakat dalam menyusun program kerja definitif. Isi program kerja tentatif harus sesuai dengan ruang lingkup dan tema KKN agar tujuan dan sasaran target KKN dapat tercapai dengan baik.

Penyusunan program kerja definitif dilakukan di hari pertama hingga ketiga pelaksanaan KKN. Penyusunan program kerja definitif harus didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam menyusun program kerja definitif, mahasiswa dapat melakukannya dengan cara observasi untuk pemutakhiran data dan menggali informasi terkini, diskusi atau musyawarah penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dengan masyarakat desa sasaran yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, dan perwakilan masyarakat umum, dan pada tahap selanjutnya, mahasiswa bersama masyarakat dan mitra terkait melakukan analisis permasalahan dan potensi, dan pengambilan keputusan mengenai rancangan penyelesaian masalah atau pengembangan berkelanjutan yang dituangkan dalam Program Kerja Definitif KKN.

4.1. KKN-PPM

KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) bertujuan agar mahasiswa peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mampu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan masyarakat dan mampu mengimplementasikan peran sebagai pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan. Selain itu melalui KKN-PPM ini mahasiswa diharapkan mampu bekerjasama secara multidisipliner dan interdisipliner dalam berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan, menguasai berbagai cara berfikir dan bekerja multidisipliner, interdisipliner dan lintas sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktivitas pembangunan pada umumnya serta pengembangan masyarakat belajar (*learning society*) pada khususnya, mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat berdasarkan analisis ilmiah dan penerapan IPTEKS, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok dalam pelaksanaan program

pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan, dan mengembangkan jiwa tanggung jawab mahasiswa dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya kooperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi kesejahteraan bangsa.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mahasiswa wajib membuat program kerja tentatif dan definitif pada pelaksanaan kegiatan KKN. Program kerja yang tentatif dan definitif pada KKN- PPM dapat langsung diakses pada Sistem Informasi SISKA.



PROGRAM KERJA TENTATIF/DEFINITIF
PROGRAM KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. METODE PELAKSANAAN DAN TUGAS PERSONALIA KKN-PPM

BAB III. PROGRAM KERJA

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

4.2. KKN Tematik Regular

KKN Tematik Regular adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). KKN Tematik Regular berbasis problem solving untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan mahasiswa terfokus untuk mengatasi masalah tertentu saja. Sifat KKN Tematik Regular ini ialah melembaga, koordinatif, interdisipliner, berkesinambungan dan berbasis kemasyarakatan. Adapun sasaran KKNT Regular UNPER ialah meningkatnya percepatan pembangunan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan infrastruktur wilayah, kemandirian energi dan kecukupan air baku, penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup, pembangunan pedesaan, pengembangan budaya lokal, wisata dan destinasi wisata.

Selain itu sasaran lainnya ialah memberikan pengalaman & keterampilan kepada mahasiswa tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara interdisipliner dalam memecahkan masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kemajuan masyarakat. Maka program kerja tentatif dan definitif dibuat sesuai dengan tema KKN yang diusulkan.

4.3. KKN Tematik MBKM

Program MBKM adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi lulusan, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Permendikbud No. 3 tahun 2020 sangat mengakomodir tuntutan penyesuaian kualitas SDM, sehingga salah satu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu memberi hak belajar mahasiswa di luar kampus untuk mengoptimalkan kemampuan *hard-skill* dan *soft-skill* menjadi sangat tepat. Salah satu kegiatan mahasiswa belajar di luar kampus adalah KKN Tematik Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (KKNT-MBKM).

Konsep KKNT-MBKM mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pilar ke empat, yaitu hak mahasiswa belajar tiga semester di luar program studi. Satu semester KKNT-MBKM memiliki bobot 20 sks.

Program kerja KKN Tematik MBKM dapat menggunakan template berikut.

1. SAMPUL:

USULAN PROGRAM KERJA TENTATIF/DEFINITE KKNT-MBKM Judul Kegiatan  Nama Mahasiswa: NIM: Program Studi: LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA TASIKMALAYA TAHUN PELAKSANAAN

2. HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN	
Judul Kegiatan :	
Nama Mahasiswa :	
NIM :	
Program Studi :	
Tasikmalaya, Juli 2023	
Disetujui oleh:	
Kepala Desa/atasan tempat pelaksanaan MBKM ttd + stemple Nama	Dosen Pembimbing Lapangan ttd Nama NIDN.
Ketua L2PM	
ttd + Stempel	
Dr. Putri Dian Wulansari, M.Si NIDN. 0419068802	

2 BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan harus berisi uraian analisis situasi dan permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan memuat: a) Uraian umum lokasi KKT-MBKM, disertai dengan identifikasi potensi unggulan dan berbagai permasalahan yang ada di desa/wilayah lokasi KKNT-MBKM; b) uraian secara lengkap profil kelompok sasaran beserta potensi atau permasalahannya dari berbagai segi; c) identifikasi masalah utama terkait dengan keadaan yang ingin diperbaiki melalui Program KKNT-MBKM. Pada bab ini juga harus berisi deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan yang memuat strategi penyelesaian permasalahan (solusi) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3 BAB II METODE PELAKSANAAN KKNT-MBKM

Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan kegiatan penyelesaian masalah, runtutan kegiatan yang disusun secara sistematis, rasional dan fleksibel sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa, menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra, dan menjelaskan tugas personalian KKNT-MBKM.

4 BAB III PROGRAM KERJA

Program kerja menyampaikan program-program terkait pelaksanaan KKNT-MBKM yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tempat pelaksanaan KKNT-MBKM dosen pembimbing lapangan. Pelaksanaan program kerja yang akan dilaksanakan mencakup beberapa bidang yang mampu menunjukkan perubahan atau keberhasilan. Template untuk program kerja KKNT-MBKM sebagai berikut:

Tabel 4. Program kerja KKNT-MBKM Tahun Akademik

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

MINGGU KE-	BIDANG PROGRAM DAN KEGIATAN	MASYRAKAT SASARAN	MITRA KERJA	INDOKATOR KEBERHASILAN
1				
2				
dst				

5 BAB IV RANCANGAN ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN

Dalam melaksanakan program kerja pastinya membutuhkan biaya untuk menunjang terjuwudnya program, maka diperlukan rancangan anggaran, baik itu untuk bahan, media, pengumpulan data ataupun yang lainnya. Untuk rancangan anggaran kegiatan dapat menggunakan template sebagai berikut:

Tabel 5. Contoh Rancangan Anggaran Kegiatan

No.	Program Kegiatan	Besaran Dana (Rp.)	Sumber Dana
1			
2			
dst			
Total			

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Program KKNT-MBKM KKN

No	Program Kegiatan	1	2	3	4	5			

1 BAB V RENCANA ALOKASI SKS DALAM KEGIATAN KKNT-MBKM

Tabel 7. Rencana Alokasi SKS KKNT-MBKM Program Studi.....

No	Bidang program dan kegiatan	Mata Kuliah yang disetarakan	SKS
1			
2			
dst			
TOTAL SKS			20

BAB V TAHAPAN KEGIATAN KKN DAN PENILAIAN

5.1. Tahap Kegiatan KKN

5.1.1 Tahap Pra-Pelaksanaan KKN

Tahap pra-pelaksanaan KKN terdiri atas tahapan:

- a. Kontrak mata kuliah KKN pada simantap.unper.ac.id
- b. Pembayaran KKN melalui Virtual Account yang tertera pada simantap.unper.ac.id
- c. Pendaftaran peserta KKN melalui *webserver* siska.unper.org
- d. Pendaftaran DPL melalui *webserver* siska.unper.org
- e. Pengelompokkan Mahasiswa
- f. Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- g. Pembekalan DPL, PLD, dan Mahasiswa Peserta KKN
- h. Pengambilan atribut KKN
- i. Penyusunan Program Kerja Tentatif.
- j. Unggah Proker Tentatif ke siska.unper.org.

5.1.2. Tahap Pelaksanaan KKN

Tahap pelaksanaan KKN terdiri atas tahapan:

- a. Pelepasan peserta KKN
- b. Penyusunan Program Kerja Definitif
 - 1) Penyusunan Proker Definitif dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan Tokoh Masyarakat di lokasi KKN, PLD, dan DPL. Diskusi Program Kerja dan Kegiatan tersebut didasarkan atas Proker Tentatif.
 - 2) Hasil diskusi dan konsultasi Program Kerja dengan Tokoh Masyarakat Desa dituangkan dalam matriks Program Kerja Definitif.
 - 3) Program Kerja Definitif kemudian dikonsultasikan kepada DPL.
 - 4) *Soft file* Program Kerja Definitif yang sudah lengkap dikirim ke DPL dan LP2M melalui siska.unper.org.
- c. Pembuatan Matriks Realisasi Pelaksanaan Program Kerja dan menempelkannya di tempat tinggal Mahasiswa selama KKN.
- d. Pembuatan dan pengunggahan catatan mingguan yang berisi penjelasan aktivitas pelaksanaan KKN dan sesuai template yang tercantum pada sistem KKN.

5.1.3. Tahap Pasca-KKN

Tahap pasca KKN terdiri atas tahapan:

- 1) Mahasiswa melaksanakan EXPO
- 2) Mahasiswa membuat Video Kegiatan KKN yang diupload pada Youtube dan disisipkan link

YouTube tersebut pada Sistem Informasi SISKAS

- 3) Mahasiswa berkolaborasi dengan DPL dalam membuat luaran berupa draft buku dan di upload pada Sistem Informasi SISKAS

5.2. Penilaian Mahasiswa Peserta KKN

5.2.1. Penilai

Penilai KKN terdiri atas LP2M/Panitia KKN dan DPL. Penilaian oleh LP2M/Panitia KKN ditujukan pada komponen aktifitas partisipatif pada saat pra-KKN, Expo dan ujian akhir pada pasca KKN. LP2M/Panitia KKN memberikan nilai sebanyak 25% yang terdiri dari 5% komponen aktifitas partisipatif, 10% pada komponen expo, dan 10 % pada komponen ujian akhir KKN. Sedangkan penilaian oleh DPL dilakukan pada on KKN terhadap unsur aktifitas partisipatif dan hasil proyek. DPL memberikan nilai sebanyak 75% yang terdiri dari 25% komponen aktifitas partisipatif dan 50% komponen hasil proyek. Penilaian PLD, penilaian teman sejawat, dan penilaian diri sendiri dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi DPL dalam memberikan penilaian pada komponen aktifitas partisipatif mahasiswa.

5.2.2. Sistem penilaian

Sistem penilaian KKN didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP). Patokan nilai yang digunakan adalah sebagai berikut :

A = > 85 - 100

B = > 70 – 84,9

C = > 60 – 69.9

D = > 50 – 60,9

E = $\leq$ 50

5.2.3. Komponen penilaian

Komponen yang dinilai meliputi Pra KKN, Pelaksanaan KKN (On KKN), dan Pasca KKN.

Bobot nilai dari setiap komponen penilaian KKN adalah sebagai berikut:

A. Penilaian pra KKN

1. Kehadiran pada saat pembekalan (5%)

B. Penilaian On KKN

Penilaian pada saat pelaksanaan KKN (bobot nilai 50%) terdiri atas:

1. Aktifitas Partisipatif (15%):
 - a. Kehadiran di lokasi KKN (15%)
2. Hasil Proyek (35%):
 - a. Kualitas Proker Tentatif dan Definitif (10%)
 - b. Pelaksanaan proker (25%)

C. Penilaian Pasca KKN

Penilaian pasca pelaksanaan KKN (bobot nilai 45%), yang terdiri atas:

1. Proses Pembuatan Luaran (bobot nilai 25%)
2. Expo KKN dan Draft Buku (bobot nilai 20%)

5.2.4. Penilaian Akhir KKN

Nilai akhir KKN merupakan hasil penggabungan dari seluruh komponen penilaian. Nilai akhir tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi antara DPL dengan LP2M/Panitia KKN. Apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, Ketua LP2M menetapkan nilai akhir mahasiswa KKN. Nilai akhir mahasiswa KKN kemudian dikirim secara tertulis kepada Dekan yang ditembuskan kepada Biro/Bagian Akademik untuk dimasukkan ke dalam simantap yang terkoneksi dengan pangkalan data perguruan tinggi (PDDIKTI).

5.3. Sertifikat KKN

Mahasiswa peserta KKN yang dinyatakan lulus dalam melaksanakan KKN-PPM berhak menerima Sertifikat KKN. Sertifikat KKN ditandatangani oleh Ketua LP2M dan diketahui oleh Rektor.

BAB VI TATA TERTIB PESERTA KKN

6.1 Manfaat Tata Tertib

Seluruh Mahasiswa peserta KKN diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan tata tertib peserta KKN ini. Adapun manfaat dari mentaati seluruh tata tertib KKN ini adalah:

1. Memberikan jaminan keberhasilan kegiatan dan menjaga nama baik almamater.
2. Membangun citra KKN dan persepsi khalayak masyarakat terhadap program KKN UNPER
3. Mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan KKN UNPER.

6.2 Tata Tertib dalam Pelaksanaan KKN

Seluruh Mahasiswa peserta KKN:

1. Wajib mengikuti kegiatan pembekalan, pelepasan, dan penarikan KKN
2. Wajib melaksanakan kegiatan KKN selama 35 hari di Desa yang telah ditentukan.
3. Wajib menerapkan protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan.
4. Wajib mengisi catatan mingguan sesuai template yang tercantum pada laman sistem KKN.
5. Wajib menghayati, menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, serta menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya masyarakat yang berlaku selama melaksanakan kegiatan KKN.
6. Wajib bersikap sopan, tertib, dan disiplin yang mencerminkan kepribadian yang luhur, untuk senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.
7. Wajib menyusun program kerja tentatif berdasarkan ketentuan yang disampaikan pada pembekalan, konsultasi, dan diskusi dengan DPL.
8. Wajib menyusun Program Kerja Definitif berdasarkan program kerja tentatif yang disempurnakan dari hasil konsultasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat di bawah bimbingan DPL dan PLD.
9. Wajib mengunggah program kerja tentatif dan definitif pada sistem yang telah ditentukan.
10. Wajib melaksanakan program kerja KKN sesuai program kerja definitif yang telah dibuat.
11. Wajib melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program per minggu sesuai template yang tersedia pada sistem sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Wajib menempelkan matriks program kerja dan Banner KKN
13. Wajib membuat video kegiatan pelaksanaan program kerja KKN

14. Wajib mengunggah video kegiatan pelaksanaan program kerja KKN pada YouTube
15. Wajib menyusun Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan KKN.
16. Wajib mengunggah laporan akhir pada sistem yang telah ditentukan panitia.
17. Wajib melakukan Ujian Akhir KKN.
18. Wajib melakukan pengecekan nilai KKN pada simantap.unper.ac.id.

6.3 Larangan, Jenis Larangan, dan Sanksi

6.3.1. Larangan

1. Selama masa KKN peserta dilarang mengikuti kegiatan kampus baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
2. Peserta KKN dilarang menjalankan fungsi ganda, seperti: sebagai wartawan, anggota ormas, atau organisasi politik di lokasi KKN.
3. Peserta KKN dilarang melakukan perbuatan asusila, kriminal, SARA, dan penyalahgunaan narkoba.
4. Peserta KKN dilarang mengucapkan atau bertindak yang dapat merusak nama baik almamater, dan mengganggu ketertiban atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
5. Peserta KKN dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin.
6. Peserta KKN dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan tanpa ijin dari masyarakat maupun DPL.

6.3.2. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

1) Pelanggaran Ringan

a Jenis-jenis Pelanggaran Ringan

1. Tidak menyerahkan laporan mingguan selama 2 pekan.
2. Mengisi laporan mingguan melebihi tanggal yang yang ditentukan.
3. Meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin sampai batas toleransi 1 x 24 jam.

b Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat berupa :

1. Teguran lisan oleh DPL dan atau
2. Teguran lisan oleh LPPM

2) Pelanggaran Sedang

a Jenis-jenis pelanggaran sedang

1. Meninggalkan lokasi KKN melebihi batas toleransi 2 x 24 jam.
2. Peserta telah 2 kali melakukan pelanggaran ringan.

b. Sanksi terhadap pelanggaran sedang dapat berupa :

1. Teguran secara tertulis dari DPL atau Tim LPPM
2. Penurunan nilai KKN paling banyak 50%.

3) Pelanggaran Berat

a. Jenis-jenis pelanggaran berat

1. Meninggalkan lokasi KKN melebihi 3 x 24 jam berturut-turut dengan alasan apapun.
2. Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan.
3. Menjalankan fungsi ganda selama kegiatan KKN.
4. Melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan kriminal, asusila, SARA, narkoba, miras, kegiatan politik praktis, terlibat dalam pemilihan Kades, unjuk rasa, menimbulkan konflik dalam masyarakat, serta tidak memperhatikan surat peringatan dari DPL atau LPPM.
5. Melakukan perbuatan, sikap, dan atau perkataan yang dinilai sebagai tindakan mencemarkan nama baik almamater.
6. Peserta yang memanfaatkan orang lain sebagai dirinya (joki) dalam ujian KKN.
7. Peserta yang telah melakukan 2 kali pelanggaran sedang.

b. Sanksi terhadap pelanggaran berat

1. Diperbolehkan meneruskan kegiatan KKN dengan penurunan nilai KKN paling banyak 75%.
2. Peserta KKN diminta mengundurkan diri.
3. Berdasarkan rekomendasi ketua LPPM kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diberikan sanksi berupa :
 - a) Peserta KKN yang bersangkutan dinyatakan gugur,
 - b) Sanksi akademis
 - c) Yang bersangkutan tidak akan diijinkan melakukan kegiatan KKN tanpa jaminan dari fakultas bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan pelanggaran yang sama.

BAB VII EXPO KKN

Kegiatan Expo dilaksanakan pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi strategis yang didesain untuk mendemonstrasikan hasil pengabdian dan intervensi yang telah diakuisisi oleh mahasiswa selama periode pelaksanaan program tersebut. Expo ini diselenggarakan baik secara online maupun offline, menyediakan aksesibilitas optimal bagi seluruh entitas yang terafiliasi dalam program. Pada kegiatan ini, mahasiswa akan mempresentasikan manuskrip komprehensif yang mengintegrasikan data empiris mengenai potensi desa yang menjadi fokus pengabdian, mencakup potensi alam, ekonomi, social dan budaya, infrastruktur, pariwisata, serta tantangan dan prospek pengembangan yang dihadapi oleh entitas desa.

Manuskrip ilmiah atau draft buku tersebut tidak hanya berfungsi sebagai repositori dokumentasi, tetapi juga merepresentasikan transformasi hilirisasi dari program KKN yang berorientasi pada diseminasi pengetahuan dan transfer informasi dari civitas akademika kepada spektrum masyarakat lebih luas. Melalui Expo ini, Universitas Perjuangan Tasikmalaya sebagai institusi penyelenggara diproyeksikan dapat mengoptimalisasi reputasi akademiknya, mengarsipkan aktivitas ilmiah secara sistematis, serta mengintensifikasi jaringan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini merupakan elemen krusial dalam mendemonstrasikan komitmen institusional terhadap pengembangan komunitas dan kontribusi substansial pada pembangunan kawasan rural.

Bagi Mahasiswa, transformasi output kegiatan KKN ke dalam format manuskrip ilmiah atau draft buku ini menghasilkan multiplisitas manfaat. Selain memfasilitasi peningkatan kapabilitas literasi akademik, mahasiswa juga akan mengembangkan kompetensi metodologis dalam melakukan eksplorasi komprehensif terhadap potensi desa, partisipasi dalam publikasi ilmiah, serta memperoleh rekognoso atas kontribusi intelektual mereka. Ini merupakan kesempatan instrumental bagi pengembangan kompetensi akademik dan profesional yang bersifat transferable untuk aplikasi di masa mendatang.

Sementara untuk desa sebagai lokus implementasi KKN, keberadaan manuskrip ilmiah ini memiliki implikasi positif yang signifikan. Kompilasi tersebut akan berfungsi sebagai referensi informasi yang komprehensif, meningkatkan representasi dan visibilitas desa, serta mengkatalisasi pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan informasi yang terstruktur dan tervalidasi secara metodologis, diproyeksikan dapat meningkatkan angka partisipasi komunitas desa dalam berbagai insiatif pembangunan yang terimplementasi.

Expo ini tidak hanya berfungsi sebagai media presentasi hasil kegiatan KKN, tetapi juga sebagai instrument fasilitas yang terkoneksi yang substansial antara institusi Pendidikan tinggi, civitas akademika, dan kounitas rural. Melalui sinergi kolaboratif ini, diproyeksikan terbentuk ekosistem interaktif yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan kolektif.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Program KKN yang dilaksanakan di UNPER bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mengabdikan diri dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada saat kuliah dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan. Dalam hal penjaminan mutu untuk program ini, beberapa instrumen monitoring dan evaluasi serta survei kepuasan disusun untuk memantau dan memastikan kualitas pelaksanaan program KKN. Unsur yang terlibat pada kegiatan monitoring dan evaluasi serta survei kepuasan diantaranya:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),
3. Mahasiswa peserta KKN,
4. Pendamping Lapangan Desa (PLD),
5. Kepala Desa lokasi KKN,
6. Pimpinan mitra kegiatan KKN.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada kegiatan KKN ini ialah:

1. Monev Terhadap Kegiatan KKN oleh LPPM
2. Monev Mingguan oleh Pembimbing Lapangan Desa (PLD)
3. Monev Mingguan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
4. Monev Expo KKN oleh LPPM

Sedangkan survei kepuasan dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan KKN
2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
3. Kepuasan Mitra
4. Kepuasan Desa
5. Kepuasan pelaksanaan Expo KKN

BAB IX PENUTUP

Buku Pedoman KKN ini disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjadi salah satu acuan mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Buku pedoman ini juga menjadi acuan yang jelas bagi Program Studi, Fakultas, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengawal kegiatan tersebut dari proses persiapan hingga tahap pelaporan. Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.